

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG  
PENGEMBANGAN DESA WISATA CIHIDEUNG,  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**Marta Dina Narulita**  
STIEPAR YAPARI, Bandung  
martadina87@gmail.com

**ABSTRAK**

*Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan desa wisata. Hal ini dikarenakan pengembangan desa wisata banyak memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting untuk menunjang keberhasilan pengembangan desa wisata sehingga masyarakat yang tidak berdaya perlu diberdayakan untuk menciptakan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Cihideung berdasarkan pada bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara, dan untuk alat pengumpulan data peneliti menggunakan kuesioner. Sedangkan untuk pengolahan kuesionernya sendiri peneliti menggunakan perhitungan skala likert. Sumber data dari penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat, Pegawai Kantor Desa Cihideung, dan masyarakat Desa Cihideung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Cihideung secara umum telah berjalan baik. Bentuk pemberdayaan psikologi di Desa Cihideung berada pada kriteria sangat baik. Sedangkan pada bentuk pemberdayaan sosial serta pemberdayaan politik berada pada kriteria cukup. Namun, pada bentuk pemberdayaan ekonomi berada pada kriteria kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Cihideung yang dilihat dari 4 bentuk pemberdayaan masyarakat tersebut belum berjalan secara baik.*

**Kata kunci:** Pemberdayaan masyarakat, desa wisata

**COMMUNITY EMPOWERMENT IN SUPPORTING THE  
DEVELOPMENT OF TOURIST VILLAGE CIHIDEUNG, KABUPATEN  
BANDUNG BARAT**

**ABSTRACT**

*Community empowerment is an important aspect in the development of tourist village. This is because the development of tourist village utilizing many*

*resources of the community. The community has an important role to success the tourist village development so that people who are powerless need to be empowered to create self-sufficiency and improved economic welfare. This research is intended to find out the implementation of community empowerment at Cihideung based on forms of community empowerment. The methodology used in this research is qualitative method. In this research, researchers conducted interview, and for an instrument of collecting data, researchers used the questionnaire. While for reprocessing the questionnaire, researchers used Likert Scale. The data source of this research is the Department of Culture and Tourism of West Bandung Regency, Employee of Cihideung Village Office, and peoples of Cihideung. The result of research shows that the empowerment of people in the village of Cihideung generally been going well. This form of psychological empowerment in Cihideung village is at very good criterion. While the forms of social empowerment and political empowerment are at sufficient criteria. However, the forms of economic empowerment are at fewer criterions. It shows that the implementation of community development in the village as seen from the fourth Cihideung form of community empowerment is not running well.*

**Keywords:** *Community empowerment, tourist village*

## **PENDAHULUAN**

Pariwisata hendaknya mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan. Pendapat ini dikemukakan mengingat dalam kehidupan sosial Indonesia, pada saat ini penafsiran berbagai kegiatan didominasi oleh pandangan yang berorientasi pada pembangunan semata (*development oriented*), sehingga tidak jarang pembangunan yang lebih menekankan pada kepentingan masyarakat menjadi terlewatkan dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*) menjadi terabaikan. Perkembangan satu dasawarsa terakhir ini menunjukkan bahwa betapapun kaum *developmentalist* yakin akan kemampuan pariwisata sebagai salah satu mesin devisa negara, namun pada saat yang sama dengan adanya era globalisasi, serangkaian akibat negatif selalu mengikutinya, misalnya saja terjadinya penurunan kualitas lingkungan alam, sosial dan kebudayaan, kesenjangan ekonomi antar masyarakat setempat dengan para penanam modal. Selain itu, dengan maraknya ekspansi pariwisata dan intervensi modal asing di daerah-daerah dan wilayah perdesaan, mengakibatkan terjadinya marginalisasi posisi sosial ekonomi masyarakat setempat (Suryo Sakti, 2012:1-2).

Dalam upaya meminimalisasi berbagai dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif pariwisata lahirlah pemikiran untuk mengembangkan pariwisata yang berpihak pada masyarakat di sekitar objek wisata, yang kemudian dikenal dengan istilah pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat. Dalam paradigma baru mengembangkan pariwisata yang berbasis pada masyarakat tersebut, menuntut adanya perubahan pada pendekatan *top down* yang selama ini digunakan, menjadi pendekatan *bottom up*. Pendekatan ini

sangat sesuai dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat dan merupakan hal pokok yang harus dijalankan.

Salah satu pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam bidang pariwisata adalah melalui pengembangan desa wisata. Dengan adanya pengembangan desa wisata, perekonomian masyarakat pedesaan diangkat melalui kegiatan pariwisata, di mana pengembangan pariwisata berdasar pada unsur-unsur kegiatan yang telah ada di pedesaan, serta ciri khas budaya setempat. Dengan kata lain, pengembangan kegiatan pariwisata tidak terlepas dari ciri kegiatan masyarakat pedesaan yang sudah ada, baik aspek ekonomi maupun sosial budaya.

Pemberdayaan selalu tertuju pada terjadinya peningkatan kesadaran dan pengembangan potensi atau kemampuan untuk membuat sesuatu menjadi berbeda dan untuk membuat tindakan perubahan yang signifikan ke arah peningkatan mutu dan taraf kehidupan yang lebih baik.

Masyarakat setempat (lokal) memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan desa wisata. Apabila desa wisata dikembangkan tanpa mengikutsertakan masyarakat, maka akan menghasilkan implikasi negatif. Indikatornya dapat terlihat dari munculnya kesenjangan ekonomi antara masyarakat setempat dengan para penanam modal.

Desa wisata merupakan suatu pariwisata alternatif yang memadukan antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan budaya masyarakat. Kegiatan wisata ini juga langsung menyentuh dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Serta biasanya ditunjang dengan *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan dengan partisipasi aktif.

Desa Cihideung merupakan salah satu kawasan yang menarik di Kabupaten Bandung Barat bagian utara. Lokasi ini sudah lama dijadikan sebagai sentra budidaya pembibitan bunga, yang dalam masyarakat lokal disebut dengan "*kembang*". Dengan ketinggian kurang lebih 1.100 meter di atas permukaan laut dan bersuhu dingin. Daerah ini merupakan daerah yang cocok untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman hias, tanaman potong, maupun buah-buahan. Hampir semua penduduk menggantungkan hidupnya dari berjualan bunga dan tanaman. Hamparan bunga beraneka ragam dan warna terlihat di sepanjang kiri dan kanan jalan di area desa Cihideung. Semua lahan di sepanjang jalan Cihideung ditanami berbagai jenis bunga, karena itu banyak yang menyebut desa Cihideung sebagai kawasan taman bunga.

Masyarakat desa Cihideung sebagian besar mengandalkan pertanian bunga untuk menopang kehidupannya. Mereka mengandalkan perolehan pendapatan melalui penjualan bunga atau tanaman hias. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para petani bunga, seperti banyaknya pesaing, serta sepihnya permintaan pasar yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi maupun politik. Kondisi yang demikian membuat petani bunga melihat pengembangan pariwisata sebagai alternatif yang memungkinkan karena potensinya memang ada.

Akan tetapi, petani bunga sendiri tidak mampu berbuat banyak untuk pengembangan pariwisata tersebut, sebab partisipasi atau peran serta petani bunga yang rendah, tidak adanya kekuatan kolektif, serta pengorganisasian masyarakat yang kurang baik dan cenderung lemah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang terjadi di desa Cihideung kurang berjalan dengan baik.

Walaupun selama ini pembicaraan mengenai pemberdayaan masyarakat lokal terhadap kegiatan pariwisata lebih banyak difokuskan pada masalah ekonomi saja, dalam kenyataannya pembangunan pariwisata itu merupakan kegiatan yang multidimensional, tidak hanya semata-mata masalah ekonomi saja. Sehingga perlu dilihat bentuk pemberdayaan masyarakat yang lainnya seperti pemberdayaan psikologi, pemberdayaan sosial, serta pemberdayaan politik, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Scheyvens (dalam Sharpley, 2000:7). Hal ini diharapkan agar potensi masyarakat yang ada di desa Cihideung dapat diberdayakan lebih lagi oleh pemerintah.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Cresswell, 1998:15) Lokasi penelitian ini berada di kawasan Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Desa Cihideung merupakan salah satu desa yang terletak di kawasan Bandung Utara yang berhawa sejuk dan subur. Desa ini mempunyai luas area sekitar 445,410 ha, dengan jumlah RW sebanyak 17 RW, sedangkan jumlah RT adalah sebanyak 51 RT.

Menurut Sutopo (2006:9), metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif meliputi interview dan observasi berperanserta, sedangkan metode noninteraktif meliputi observasi takberperanserta, teknik kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kuesioner dan perhitungan skala likert untuk mengukur hasil kuesioner, sebagai skala penilaian.

Untuk mendapatkan data yang valid dan reliable dalam penelitian ini digunakan beberapa instrument penelitian, yaitu pedoman wawancara untuk wawancara dan alat bantu *tape recorder*, kuesioner untuk masyarakat, serta buku catatan untuk observasi. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dan pembagian kuesioner kepada beberapa masyarakat Desa Cihideung.

Data kuesioner yang sudah berhasil dikumpulkan dihitung menggunakan perhitungan skala likert sebagai skala penilaian dengan rentang interval. Menurut Iskandar (2009:83) Skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena atau gejala social yang terjadi. Hal ini sudah spesifik dijelaskan oleh peneliti. Yang selanjutnya

disebut sebagai variable penelitian. Kemudian dijabarkan melalui dimensi-dimensi menjadi su-variabel, kemudian menjadi indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan variable penelitian.

Skala likert tersebut merupakan skala penilaian yang hasilnya berupa interval. Berikut rumus menghitung interval:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah jenis kriteria penilaian}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi di Desa Cihideung

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat, bantuan modal yang diberikan pada program PNPM Mandiri Pariwisata tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa peralatan ataupun pelatihan bagi masyarakat desa. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat hanya melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang PNPM Mandiri Pariwisata berupa desa wisata. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat yang bertugas di lapangan menyiapkan, mengurus, dan mengelola semua hal yang berhubungan dengan program PNPM Mandiri Pariwisata tersebut. Padahal seharusnya usulan mengenai bantuan modal tersebut berasal dari hasil musyawarah masyarakat yang kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah mengajukan kepada kementerian, agar bantuan modal tersebut tepat sasaran.

Sedangkan untuk pengalokasian modal untuk masyarakat diberikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dari unit pariwisata yang ada pada struktur organisasi di desa. Unit pariwisata tersebut dapat berupa kelompok-kelompok kuliner, kelompok-kelompok *handicrafts*, dan kelompok-kelompok sadar pariwisata (pokdarwis). Sedangkan untuk kelompok petani bunga bukan menjadi bagian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan Dinas Pertanian.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat setiap tahun membuat *booklet*, *pamphlet*, dan brosur yang berisikan informasi mengenai desa Cihideung yang diletakan di hotel ataupun restoran yang ada di kawasan desa Cihideung sebagai media pemasaran. Selain itu juga, setiap tahunnya diadakan sebuah acara yang diberi nama Festival Cihideung.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan rekapitulasi pemberdayaan ekonomi di desa Cihideung:

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Hasil Penilaian Pemberdayaan Ekonomi**  
**di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat**

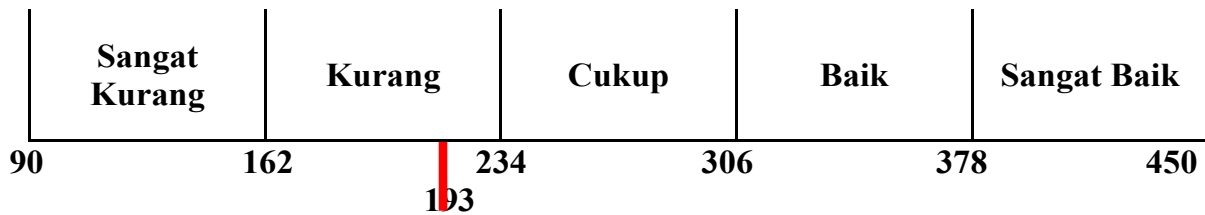
No	Aspek	Nilai	Kriteria
1	Pemerintah memberikan bantuan modal untuk membuat usaha	22	Kurang
2	Pemerintah menyediakan kios-kios untuk usaha masyarakat	18	Kurang
3	Pemerintah mengalokasikan modal secara merata kepada masyarakat	21	Kurang
4	Tersedianya prasarana jalanan, jaringan komunikasi, dan listrik yang baik	24	Kurang
5	Banyak tersedianya angkutan umum menuju desa Cihideung	24	Kurang
6	Pemerintah menyediakan program pelatihan dan pendidikan pada masyarakat mengenai pembuatan usaha	23	Kurang
7	Pemerintah memberikan bimbingan dalam proses pembelajaran masyarakat untuk membuat usaha	22	Kurang
8	Terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	19	Kurang
9	Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mempermudah masyarakat berkoordinasi	20	Kurang
<b>Total</b>		193	

*Sumber: Hasil Olahan Data Kuesioner, 2014*

Untuk menganalisis data pada Tabel 1 mengenai rekapitulasi penilaian pemberdayaan ekonomi di desa Cihideung, maka peneliti melakukan perhitungan dengan menggunakan skala likert. Adapun hasil dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah responden} &= 10 \\
 \text{Nilai tertinggi} &= 5 \times 10 \times 9 = 450 \\
 \text{Nilai terendah} &= 1 \times 10 \times 9 = 90 \\
 \text{Interval} &= \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah jenis kriteria penilaian}} \\
 &= \frac{(5 \times 10 \times 9) - (1 \times 10 \times 9)}{5} \\
 &= 72
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka rentang skala penilaian adalah sebagai berikut:



Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pemberdayaan ekonomi di desa Cihideung dapat dikatakan Kurang. Dari keempat aspek pernyataan mengenai pemberdayaan ekonomi di desa Cihideung, semuanya berada pada posisi kurang. Hal ini karena beberapa masyarakat yang berada di kawasan dusun Cihideung belum merasakan adanya bantuan pelatihan dan pembimbingan untuk membuka usaha dari pemerintah.

Pada dasarnya pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM, dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal. Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidak seluruhnya dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi semata, karena banyak dimensi-dimensi politik yang harus ditangani. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa pemberdayaan politik dan kebijakan politik. Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi komitmen dan kebijakan semua departemen, sebab dimensi yang harus ditangani dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bersifat multi.

Bentuk pemberdayaan ekonomi yang terjadi di desa Cihideung adalah melalui PNPM Mandiri Pariwisata yang diberikan kepada unit pariwisata seperti kelompok-kelompok *handicrafts*, kelompok-kelompok kuliner, dan juga kelompok-kelompok sadar pariwisata (Pokdarwis). Program PNPM Mandiri Pariwisata adalah program yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada pemerintah daerah, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan konsep desa wisata. Bantuan modal yang diberikan pada program ini juga bukan berupa dana tunai, melainkan bantuan perlengkapan ataupun pelatihan bagi kelompok-kelompok dari unit pariwisata. Sedangkan untuk modal berupa dana tunai berdasar kepada SKPD No 32, masuk dari hibah bantuan sosial.

Selain itu pemerintah daerah melalui anggaran APBD setiap tahunnya mengadakan Festival Cihideung yang mampu menambah angka kunjungan wisatawan ke Cihideung.

Perlu adanya peningkatan pada penyediaan program pelatihan dan pembimbingan bagi masyarakat sekitar untuk membuka usaha, selain itu kios-kios bunga yang berada di dusun Cihideung merupakan milik pribadi ataupun hasil menyewa. Masyarakat yang berada di dusun Cihideung mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk memberikan kios-kios bagi mereka agar usaha yang mereka miliki saat ini bisa lebih berkembang lagi. Selain itu juga untuk aspek bantuan pembangunan prasarana perlu adanya perbaikan, karena pembangunan prasarana tersebut merupakan suatu usaha untuk mendorong agar masyarakat berdaya. Pembangunan yang perlu dicermati berupa pelebaran dan perbaikan jalan utama menuju desa Cihideung. Dan diperlukan adanya tambahan unit angkutan umum yang bisa digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk pergi atau menuju desa Cihideung.

## 2. Bentuk Pemberdayaan Psikologi di Desa Cihideung

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan warga masyarakat di desa Cihideung, rasa memiliki yang ada pada mereka sudah sangat baik. Mereka bangga akan potensi agrowisata yang terdapat di sana. Masyarakat ingin ikut serta dalam pengembangan desa, salah satu contoh bentuk kebersamaan yang terjadi di desa Cihideung adalah apabila ada suatu acara, maka para masyarakat desa antusias membantu dengan bentuk swadaya baik tenaga ataupun materi.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan rekapitulasi pemberdayaan psikologi di desa Cihideung:

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Hasil Penilaian Pemberdayaan Psikologi**  
**di Desa Cihideung, Kabupaten Bandung Barat**

No	Aspek	Nilai	Kriteria
1	Saya bangga desa Cihideung memiliki potensi alam yang menarik	49	Sangat Baik
2	Saya ingin terlibat dalam pengembangan desa Cihideung	49	Sangat Baik
<b>Total</b>		98	

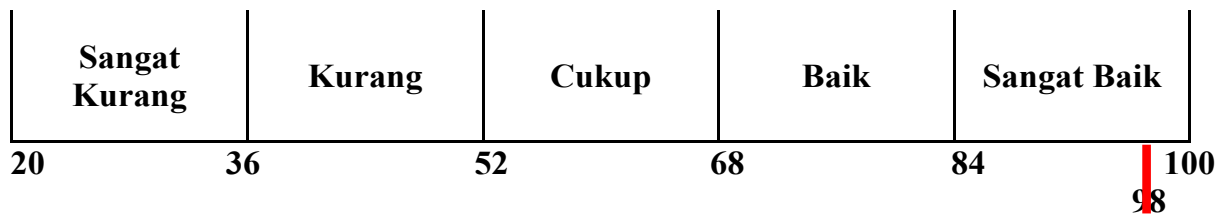
*Sumber: Hasil Olahan Data Kuesioner, 2014*

Untuk menganalisis data pada Tabel 2 mengenai rekapitulasi penilaian pemberdayaan psikologis di desa Cihideung, maka peneliti melakukan perhitungan dengan menggunakan skala likert. Adapun hasil dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:



$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah responden} &= 10 \\
 \text{Nilai tertinggi} &= 5 \times 10 \times 2 = 100 \\
 \text{Nilai terendah} &= 1 \times 10 \times 2 = 20 \\
 \text{Interval} &= \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah jenis kriteria penilaian}} \\
 &= \frac{(5 \times 10 \times 2) - (1 \times 10 \times 2)}{5} \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

Serupa dengan perhitungan skala likert yang digunakan untuk penilaian pada tabel 4.9 maka rentang skala penilaian adalah sebagai berikut:



Secara keseluruhan pemberdayaan psikologi di desa Cihideung sudah berada pada posisi sangat baik. Selain memiliki potensi alam yang sangat menarik dan juga besarnya rasa bangga masyarakat akan hal tersebut, serta rasa memiliki yang tinggi. Hal ini merupakan faktor penting yang bisa digunakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang bermaksud untuk mengembangkan desa Cihideung.

Desa Cihideung yang terletak di kecamatan Parongpong ini dulunya hanya merupakan tempat bercocok tanam ala kadarnya saja, kini telah berkembang menjadi kawasan wisata bunga. Kawasan ini memang tepat disebut sebagai kawasan wisata bunga, karena di sepanjang desa ini terlihat berbagai tanaman bunga yang dikembangkan.

Terlebih lagi saat munculnya pengakuan dari wisatawan yang bisa menimbulkan rasa bangga dari masyarakat desa Cihideung yang kemudian dapat memotivasi warga lagi untuk dapat ikut terlibat dalam aktifitas yang berhubungan dengan pengelolaan akan potensi yang dimiliki oleh desa Cihideung. Sedangkan motivasi sendiri bisa mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya pengarah dan persestensi kegiatan-kegiatan sukarela yang ditujukan ke arah pencapaian suatu tujuan.

### 3. Bentuk Pemberdayaan Sosial di Desa Cihideung

Pemberdayaan sosial terkait dengan keterpaduan masyarakat melalui kerjasama antara individu dan kelompok dalam membangun suatu usaha yang berhasil. Sebagian hasil yang diperoleh digunakan untuk pembangunan dan atau pembangunan masyarakat dari inisiatif masyarakat.

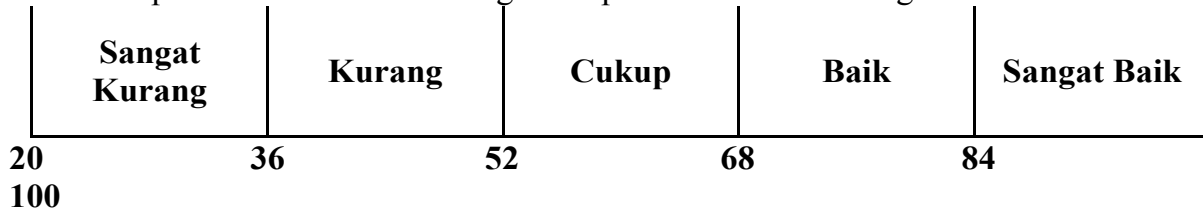
Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan rekapitulasi pemberdayaan sosial di desa Cihideung:

**Tabel 3**  
**Rekapitulasi Hasil Penilaian Pemberdayaan Sosial**  
**di Desa Cihideung, Kabupaten Bandung Barat**

No	Aspek	Nilai	Kriteria
1	Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam mengembangkan desa Cihideung	33	Cukup
2	Setiap masyarakat memiliki kontribusi tenaga ataupun pikiran dalam usaha pengembangan desa Cihideung	28	Cukup
<b>Total</b>		61	

*Sumber: Hasil Olahan Data Kuesioner, 2014*

Serupa dengan perhitungan skala likert yang digunakan untuk penilaian pada tabel 2 maka rentang skala penilaian adalah sebagai berikut:



**61**

Dari hasil penilaian pada tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa pemberdayaan sosial di desa Cihideung adalah Cukup. Kegiatan pariwisata dapat memberikan keseimbangan dalam masyarakat lokal. Keterpaduan masyarakat ditingkatkan melalui kerjasama individu dan keluarga dalam membangun industri yang bisa meningkatkan kehidupan mereka. Masyarakat juga mendapatkan jaminan sosial untuk bisa hidup lebih layak lagi. Konsep pemberdayaan sosial merupakan upaya penguatan masyarakat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma. Serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.

Pemberdayaan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengertian ini mesti dimaknai secara arif, yaitu bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah tujuan awal, agar secara bertahap kehidupan yang lebih berkualitas dan kemandirian dapat tercapai. Pemberdayaan sosial secara simultan juga diarahkan agar seluruh potensi kesejahteraan sosial dapat dibangun menjadi sumber kesejahteraan sosial yang mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hubungan kerjasama yang baik dan erat terjalin di antara individu masyarakat dalam pengembangan desa Cihideung. Terdapat beberapa kelompok masyarakat di desa Cihideung seperti kelompok petani bunga, kelompok pemuda, PKK, LPMD, dan kelompok Petapa di dusun Penyairan. Hubungan kerjasama tersebut sejak turun temurun terjalin dengan erat, tidak ada keterbatasan. Mereka rutin mengadakan pertemuan bergantian di setiap rumah penduduk untuk mengadakan pengajian atau siraman rohani. Selain itu, setiap ada suatu acara yang diadakan di desa, masyarakat akan antusias dalam memberikan kontribusi baik tenaga maupun pikiran untuk membantu.

Namun, hal tersebut tidak begitu terasa di dusun Cihideung. Masyarakat di dusun Cihideung yang kebanyakan adalah petani bunga, belum merasa memiliki tanggung jawab bersama ataupun kontribusi dalam mengembangkan desa Cihideung. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah desa agar kerjasama yang terjalin di antara masyarakat menjadi lebih baik lagi.

#### **4. Bentuk Pemberdayaan Politik di Desa Cihideung**

Pemberdayaan politik dapat dilihat melalui adanya struktur politik dalam masyarakat sebagai forum yang representatif di mana orang dapat bertanya dan dapat menyinggung soal mengenai inisiatif pariwisata. Struktur tersebut memprakarsai atau mengimplementasikan usaha pariwisata berdasarkan opini anggota dan atau kelompok masyarakat dan menyediakan pilihan guna merepresentasikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga merupakan upaya pembentukan *society* yang mandiri sebagai elemen sebuah negara demokrasi. Masyarakat sipil memiliki hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara merdeka di dalamnya, termasuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Secara institusional, ruang publik di sini termasuk media massa, tempat-tempat pertemuan umum, parlemen dan sekolah-sekolah.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan rekapitulasi pemberdayaan politik di desa Cihideung:

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Hasil Penilaian Pemberdayaan Politik**  
**di Desa Cihideung, Kabupaten Bandung Barat**

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kriteria</b>
1	Saya sudah memiliki keterlibatan dalam perencanaan pengembangan desa Cihideung	30	Cukup
2	Saya sudah memiliki keterlibatan dalam pengelolaan pengembangan desa Cihideung	28	Cukup

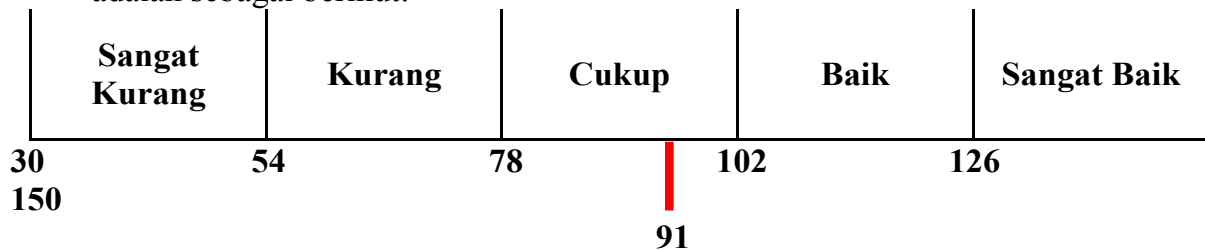
No	Aspek	Nilai	Kriteria
3	Saya sudah memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan desa Cihideung	33	Cukup
<b>Total</b>		91	

Sumber: Hasil Olahan Data Kuesioner, 2014

Untuk menganalisis data pada tabel 4 mengenai rekapitulasi penilaian pemberdayaan politik, maka peneliti juga melakukan perhitungan dengan menggunakan skala likert, adapun hasil dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah responden} &= 10 \\
 \text{Nilai tertinggi} &= 5 \times 10 \times 3 = 150 \\
 \text{Nilai terendah} &= 1 \times 10 \times 3 = 30 \\
 \text{Interval} &= \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah jenis kriteria penilaian}} \\
 &= \frac{(5 \times 10 \times 3) - (1 \times 10 \times 3)}{5} \\
 &= 24
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka rentang skala penilaian adalah sebagai berikut:



Secara keseluruhan pelaksanaan pemberdayaan politik di desa Cihideung sudah berjalan dengan cukup, karena hampir sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka memiliki keterlibatan baik dalam kegiatan perencanaan pengembangan, pengelolaan pengembangan, sampai pada pemberian keputusan dalam pengembangan desa Cihideung. Hanya ada beberapa warga masyarakat yang tinggal di dusun Cihideung yang menyatakan bahwa mereka belum cukup terlibat dalam perencanaan pengembangan, pengelolaan pengembangan, dan juga pengambilan keputusan pengembangan desa Cihideung. Hal ini mungkin dikarenakan letak dusun Cihideung yang berjauhan dengan kantor Kepala Desa Cihideung yang berada di dusun Penyairan dan hal tersebut tentu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan informasi untuk berkumpul dan bermusyawarah kepada warga masyarakat dusun Cihideung agar warga di dusun Cihideung tidak merasa terpisahkan.

Desa Cihideung terbagi menjadi empat dusun, yaitu dusun Nyingkir, dusun Cihideung, dusun Penyairan, dan dusun Kancan. Setiap dusun

memiliki kelompok masyarakat masing-masing. Untuk kelompok petani bunga kebanyakan berada di kawasan dusun Cihideung.

Komitmen perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan merupakan hal yang utama di dalam pemberdayaan politik, tetapi nyatanya ada satu dusun yang merasa belum terlibat dalam ketiga hal tersebut. Dalam hal ini sangat dibutuhkan motivasi dari perangkat petugas di kantor desa melalui bentuk ajakan berkumpul dan bermusyawarah kepada warga dusun Cihideung. Karena fokus dari pemberdayaan politik adalah upaya menciptakan akses bagi setiap warga masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depannya.

Pemberdayaan politik masyarakat tidak hanya sebatas kepada pemilihan umum saja, akan tetapi juga kemampuan untuk mengemukakan pendapat, melakukan kegiatan kolektif atau bergabung dalam berbagai asosiasi politik ataupun gerakan sosial ataupun kelompok pemegang kepentingan. Pemberdayaan politik juga bisa membuat masyarakat jadi berani untuk mengemukakan pendapat mengenai kelangsungan pengembangan desa Cihideung ke depannya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pemberdayaan ekonomi di desa Cihideung menunjukkan kriteria kurang. Dari keempat dimensi pemberdayaan ekonomi, semuanya berada pada penilaian kurang. Hal ini berarti bentuk pemberdayaan ekonomi di desa Cihideung secara umum belum berjalan dengan baik. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat sebagai pelaksana di lapangan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk program PNPM Mandiri Pariwisata hanya memberikan bantuan perlengkapan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok dari unit pariwisata saja, seperti kelompok *handycrafts*, kelompok kuliner, dan juga kelompok sadar wisata (Pokdarwis) saja, sedangkan untuk kelompok petani bunga yang banyak bermukim di desa Cihideung belum merasakan adanya bantuan dari pemerintah daerah. Hal ini disebabkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat takut terjadinya tumpang tindih dengan Dinas Pertanian. Walaupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat sudah menyediakan dana untuk mengadakan Festival Cihideung setiap tahunnya, tetapi hal tersebut masih dirasa kurang optimal oleh masyarakat desa Cihideung. Selain itu juga keadaan fasilitas umum, infrastruktur, serta keadaan transportasi umum yang ada di Cihideung memerlukan perhatian yang lebih lagi, karena pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya sekedar peningkatan akses bantuan modal usaha serta peningkatan akses pengembangan

SDM saja, tetapi peningkatan pada akses sarana dan prasarana yang mendukung datangnya wisatawan ke kawasan Cihideung juga perlu diperhatikan.

2. Bentuk pemberdayaan psikologi di desa Cihideung yang meliputi rasa bangga akan potensi yang dimiliki oleh desa Cihideung dan juga rasa ingin terlibat dalam pengembangan desa Cihideung menunjukkan kriteria sangat baik. Hal ini berarti pelaksanaan pemberdayaan psikologi di desa Cihideung secara umum sudah berjalan dengan sangat baik. Hubungan yang terjalin dengan sesama masyarakat bisa dikatakan baik dan erat. Apabila ada suatu acara, maka para masyarakat desa akan antusias memberikan bantuan dengan bentuk swadaya baik tenaga ataupun materi.
3. Bentuk pemberdayaan sosial di desa Cihideung yang meliputi tanggung jawab bersama serta kontribusi yang diberikan dalam mengembangkan desa Cihideung berada pada kriteria cukup. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial yang terjadi di desa Cihideung secara umum masih belum optimal, karena baru beberapa kelompok masyarakat saja yang menjalin kerjasama secara rutin seperti kelompok petapa yang berada di dusun Penyairan.
4. Bentuk pemberdayaan politik di desa Cihideung berada pada kriteria cukup. Hal ini disebabkan oleh ada beberapa warga masyarakat di dusun Cihideung yang berada cukup jauh dari kantor Kepala Desa Cihideung menyatakan kalau mereka belum merasa terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan juga pengambilan keputusan tentang pengembangan desa Cihideung. Hal ini perlu menjadi perhatian dari Kepala Desa Cihideung agar memberikan akses informasi untuk berkumpul dan bermusyawarah pada masyarakat yang berada di dusun Cihideung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata tahun 2011.*  
*Perda Kabupaten Bandung Barat No 4 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bandung Barat tahun 2012.*
- Antara, M. 2008. *Kumpulan Materi Kuliah Kajian Pariwisata*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Asyari, H. 2011. *Buku Pegangan Desa Wisata: Materi Bimbingan Teknis untuk Membangun Desa Wisata*. Yogyakarta. Pusat Informasi Desa Wisata DIY Tourista Anindya Guna.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chambers, R. 1995. "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.)". *People: From Improverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.

- Chambers, R. 1995. "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.)". *People: From Improverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Christie S. 2005. *Tujuan Pemberdayaan*. Diakses tanggal 2 September 2014 dari <http://chikacimoet.blogspot.com/>
- Creswell, J. W. 2002. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Endah, S. 2012. *Pengembangan Argowisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Kota Batu Jawa Timur (Disertasi)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fandeli, C R. dan DT Kaharudin. 2003. *Pengembangan Kawasan Pedesaan sebagai Objek Wisata (Perencanaan Model Kelembagaan, Pasar dan Paket Wisata Pedesaan sekitar Gunung Merapi Yogyakarta)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- Friedman, J and C. Weafer. 1979. *Territory and Function: The Evolution of Regional Planning*. London.
- Garrod, B. 2001. *Local Participation in the Planning and Management of Ecotourism: A Revised Model Approach*. Bristol: University of the West of England.
- Hadiwijoyo, S. S. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hausler, N. 2005. "Definition of Community Based Tourism". *Tourism Forum International at the Reisepavillon*. Hanover 6 Februari 2005.
- Hikmat, H. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Huda, M. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hutomo, M. Y. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritis dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas.
- Inskeep, E. 1991. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Kindervatter, S. 1979. *Non Formal Education as an Empowering Process, with Case Studies from Indonesia and Thailand (Dessertation)*. Massachusetts: Center for International Education University of Massachusetts.
- Nawawi, H. dkk. 2007. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Pranaka, AMW dan Vidhyandika. 1996. "Pemberdayaan" dalam Onny SP dan AMW Pranarka (ed). Jakarta: CSIS.
- Priasukmana, S. & R. Mohamad Mulyadin. 2001. *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*. Info Sosial Ekonomi Vol.2 No.1.
- Scheyvens, R. 1999. "Ecotourism and The Empowerment of Local Communities". *Tourism Management* (20): 245-249.
- , 2000. "Promoting Women's Empowerment Through Involvement in Ecotourim: Experiences from the Third World". *Journal of Sustainable Tourism*. Vol 8(3): 232-249.

- Sharpley, R. 2000. "Tourism and Sustainable Development: Exploring The Theoretical Divice". *Journal of Sustainable Tourism*. 8 (1): 1-19.
- Siagian. 2002. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suansri, P. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Sunartiningih, Agnes. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Jurusan Sosiatri FISIP UGM & Aditya Media.
- Suparjan. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Social Agency.
- Suratno. 1999. *Metologi Penelitian*. Yogyakarta: UPP. AMP. YKPN
- Taliziduhu, Ndraha. 2003. *Kronologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Direksi Undang - undang Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.*
- Winardi. 2002. *Motivasi dan Pemasalahan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yoeti, O. A. 1996. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- . 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.